

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)



LAPORAN REALISASI ANGGARAN NERACA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2019**



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	v
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
2. LAPORAN OPERASIONAL	
3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
4. NERACA KOMPARATIF (SKPD)	
5. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SPJ BELANJA-FUNGSIONAL	
6. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
6.1. PENDAHULUAN.....	26
6.1.1 DATA UMUM.....	26
6.1.2 MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN.....	32
6.1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORNA KEUANGAN.....	36
6.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	37
6.2.1 EKONOMI MAKRO.....	38
6.2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN.....	39
6.2.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	39
6.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	40
6.3.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH SKPD....	40
6.3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PELAPORAN KEUANGAN.....	40
6.3.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN.....	41
6.3.4 AKUNTANSI BELANJA.....	42
6.3.5 AKUNTANSI ANGGARAN, AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT DAN AKUNTANSI NON ANGGARAN.....	43
6.3.6 AKUNTANSI PERSEDIAAN.....	45
6.3.7 AKUNTANSI INVESTASI.....	46
6.3.8 AKUNTANSI PIUTANG.....	49
6.3.9 AKUNTANSI ASET TETAP.....	50
6.3.10 AKUNTANSI KEWAJIBAN.....	53
6.3.11 BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG.....	54
6.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	54
6.4.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	54
6.4.2 KOMPONEN NERACA.....	62
6.4.3 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL.....	69
6.4.4 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	73



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. A. Syukri Kompleks Gagas Permai Pelaihari 70811 Telp/fax (0512)-21552

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang Realisasi Pendapatan ,belanja dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini , realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 75.275.000,00 atau 100,37% dari yang ditetapkan dalam DPA TA. 2019 (Setelah Perubahan) Rp. 75.000.000,00
2. Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi, dan Penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Kami menyadari bahwa laporan keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

pemerintahan yang baik (good Governance). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Pelaihari, Februari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Laut



Ir. H/ Muhammad Mursyi, M.Si
NIP. 19680304 199803 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP**
Jl. A. Syukri Kompleks Gagas Permai Pelaihari 70811 Telp/fax (0512)-21552

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari ; (1)Laporan Realisasi Anggaran (LRA) , (2)Laporan Operasional, (3)Laporan Perubahan Ekuitas, (4)Neraca SKPD, (5) Laporan Pertanggungjawaban SPJ Belanja-Fungsional,dan (6) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pelaihari, Februari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Laut



Ir. H. Muhammad Mursyi, M.Si
NIP. 19680304 199803 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 04		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Unit Organisasi : 1 . 04 . 01		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
4	PENDAPATAN - LRA	81.005.000,00	81.280.000,00	100,34	74.431.500,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	81.005.000,00	81.280.000,00	100,34	74.431.500,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	75.000.000,00	75.275.000,00	100,37	73.681.500,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	6.005.000,00	6.005.000,00	100,00	750.000,00
5	BELANJA	47.329.308.754,00	37.206.136.926,00	78,61	27.756.250.890,00
5.1	BELANJA OPERASI	35.680.866.990,00	26.170.931.831,00	73,35	22.358.102.773,00
5.1.1	Belanja Pegawai	9.257.356.598,00	6.999.979.054,00	75,62	4.441.005.160,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.423.510.392,00	19.170.952.777,00	72,55	17.917.097.613,00
5.2	BELANJA MODAL	11.648.441.764,00	11.035.205.095,00	94,74	5.398.148.117,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	260.000.000,00	249.522.000,00	95,97	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.050.579.264,00	3.589.479.545,00	88,62	754.739.607,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	478.050.000,00	473.387.450,00	99,02	632.510.000,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.762.812.500,00	6.630.312.100,00	98,04	3.769.205.510,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.500.000,00	26.475.000,00	92,89	35.920.000,00
5.2.7	Belanja Modal Aset Lainnya	68.500.000,00	66.029.000,00	96,39	205.773.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(47.248.303.754,00)	(37.124.856.926,00)	78,57	(27.681.819.390,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(47.248.303.754,00)	(37.124.856.926,00)	78,57	(27.681.819.390,00)

Pelatihari, 1 Januari 2019
 Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Ir. H. Muhammad Mursy, M.Si
 NIP. 19680304 199803 1 009

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit Organisasi : 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	PENDAPATAN - LO	75.984.091,00	818.719.700,00	(742.735.609,00)	(90,72)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	75.984.091,00	73.681.500,00	2.302.591,00	3,13
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	75.275.000,00	73.681.500,00	1.593.500,00	2,16
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	709.091,00	0,00	709.091,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	745.038.200,00	(745.038.200,00)	(100,00)
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	745.038.200,00	(745.038.200,00)	(100,00)
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.6	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	26.429.699.926,46	34.245.519.767,00	(7.815.819.840,54)	(22,82)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	6.999.979.054,00	4.441.005.160,00	2.558.973.894,00	57,62
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	19.429.717.327,00	20.159.863.663,00	(730.146.336,00)	(3,62)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	9.644.620.919,00	(9.644.620.919,00)	(100,00)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	3.545,46	30.025,00	(26.479,54)	(88,19)
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN OPERASIONAL
Printed By SimDG

Halaman 1 dari 3



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.7	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.8	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(26.353.715.835,46)	(33.426.800.067,00)	7.073.084.231,54	(21,16)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	189.397.520,07	123.541.721,00	65.855.799,07	53,31
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(189.397.520,07)	(123.541.721,00)	(65.855.799,07)	53,31
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(26.543.113.355,53)	(33.550.341.788,00)	7.007.228.432,47	(20,89)
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(26.543.113.355,53)	(33.550.341.788,00)	7.007.228.432,47	(20,89)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Urusan Pemerintahan	: 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Bidang Pemerintahan	: 1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
Unit Organisasi	: 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup				
Sub Unit Organisasi	: 1.04.01.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup				

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)


Relatif pada 31 Januari 2020
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Ir. H. Muhammad Mursy, M.Si
NIP. 196801041998031009

LAPORAN OPERASIONAL Halaman 3 dari 3
Printed by: BR-SIRUJ



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 1 . 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit Organisasi	: 1 . 04 . 01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi	: 1 . 04 . 01 . 01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	140.140.982.682,52	146.779.101.948,52
SURPLUS/DEFISIT-LO	(26.543.113.355,53)	(33.550.341.788,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	30.025,00	3.750,00
Koreksi Ekuitas -Ekstrakomtabel	(1.641.600,00)	(946.000,00)
Koreksi Ekuitas -Aset Tetap	(7.833.909,01)	0,00
Koreksi Ekuitas -Aset lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas -Mutasi Antar SKPD	(24.497.838.395,00)	(768.654.618,00)
Koreksi Ekuitas - Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Jasa Giro JKN	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	37.124.856.926,00	27.681.819.390,00
EKUITAS AKHIR	126.215.442.373,98	140.140.982.682,52

Pelaihari, 1 Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
 Permukiman dan Lingkungan Hidup



Ir. H. Muhammad Mursy, M.Si
 NIP. 19680304 199803 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
 Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 1. 04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit Organisasi	: 1. 04 . 01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi	: 1. 04 . 01 . 01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

URAIAN	2019	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas di ...	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	709.091,00	6.005.000,00
Penyisihan Piutang	(3.545,46)	(30.025,00)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	126.866.650,00	385.631.200,00
R/K SKPD	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	127.572.195,54	391.606.175,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir		
Penyisihan INP Dana Bergulir	0,00	0,00
JUMLAH Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	31.423.364.900,00	54.732.067.940,00
Peralatan dan Mesin	27.437.554.374,89	23.738.833.652,89
Gedung dan Bangunan	27.934.725.427,08	28.565.179.938,15
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	87.806.091.662,36	81.333.201.662,37
Aset Tetap Lainnya	493.778.100,00	467.303.100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	344.371.500,00	264.806.000,00
Akumulasi Penyusutan	(49.441.842.539,09)	(49.441.842.539,09)
JUMLAH ASET TETAP	125.998.043.425,24	139.659.549.754,32
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	89.826.753,20	89.826.753,20
JUMLAH ASET LAINNYA	89.826.753,20	89.826.753,20
JUMLAH ASET	126.215.442.373,98	140.140.982.682,52
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		

NERACA

Printed By: SimId

Halaman 1 dari 2



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Urusan Pemerintahan : 1.04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
Unit Organisasi : 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
URAIAN	2019	2018
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	126.215.442.373,98	140.140.982.682,52
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	126.215.442.373,98	140.140.982.682,52



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Urusan Pemerintahan : 1
 Bidang Pemerintahan : 1.04
 Unit Organisasi : 1.04.01
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. H. Muhammad Mursy, M.Si
 Bendahara Pengeluaran : RISNAWATI POPPY, A.Md.PJK
 Bulan : Desember

Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.805.200.000,00	2.506.145.300,00	200.199.100,00	2.706.344.400,00	2.706.344.400,00	1.098.855.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	536.760.000,00	284.156.062,00	22.622.614,00	306.778.706,00	306.778.706,00	229.981.294,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	312.641.560,00	204.605.000,00	17.855.000,00	222.460.000,00	222.460.000,00	90.181.560,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	112.560.000,00	88.415.000,00	6.835.000,00	95.250.000,00	95.250.000,00	17.310.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	205.380.000,00	159.541.260,00	14.980.940,00	174.532.200,00	174.532.200,00	30.847.800,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 1 dari 13

Printed By SimDj



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.1.01.07	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	72.660.000,00	3.644.554,00	81.505,00	3.726.459,00	3.726.459,00	68.933.541,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	140.000,00	42.596,00	3.387,00	45.983,00	45.983,00	94.017,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.02.07	Tunjangan Penghasilan PNS berbasis kinerja	4.202.215.038,00	0,00	0,00	0,00	3.490.841.306,00	711.373.732,00
			2.951.252.821,00	539.588.485,00	3.490.841.306,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	16.550.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	13.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.150.000,00	0,00	3.150.000,00		
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	14.175.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			925.000,00	0,00	925.000,00		
5.2.1.01.04	Honorarium pengawas lapangan	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.1.02.03	Honorarium/upah lainnya	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.800.000,00	0,00	5.800.000,00		
5.2.1.02.05	Honorarium Tim/Panitia	261.475.000,00	0,00	0,00	0,00	26.200.000,00	235.275.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	22.000.000,00	26.200.000,00		
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.286.150,00	0,00	0,00	0,00	135.248.550,00	45.037.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			91.322.650,00	43.925.900,00	135.248.550,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELAJA - FUNGSIONAL)

Printed By Simid

Halaman 2 dari 13



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.950.350,00	0,00	0,00	0,00	1.388.700,00	561.650,00
			952.950,00	435.750,00	1.388.700,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	886.069.540,00	0,00	0,00	0,00	884.199.000,00	1.870.540,00
			837.509.000,00	46.690.000,00	884.199.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	24.019.000,00	0,00	0,00	0,00	18.007.000,00	6.012.000,00
			10.219.000,00	7.788.000,00	18.007.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	168.057.000,00	0,00	0,00	0,00	141.258.800,00	26.798.800,00
			129.543.300,00	11.715.500,00	141.258.800,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	6.718.000,00	0,00	0,00	0,00	6.534.000,00	184.000,00
			4.940.000,00	1.594.000,00	6.534.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja spanduk/dekorasi/baliho	61.856.915,00	0,00	0,00	0,00	30.486.000,00	31.370.915,00
			25.783.500,00	4.702.500,00	30.486.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja hadiah dalam bentuk barang	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja hadiah dalam bentuk uang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	138.935.000,00	0,00	0,00	0,00	51.327.045,00	87.607.955,00
			46.982.045,00	4.345.000,00	51.327.045,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ) BELANJA - FUNGSIONAL

Halaman 3 dari 13



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	17.765.000,00	0,00	0,00	0,00	17.765.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.765.000,00	0,00	17.765.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.750.000,00	1.250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.750.000,00	0,00	13.750.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	125.387.000,00	0,00	0,00	0,00	124.399.810,00	987.190,00
			0,00	92.347.475,00	92.347.475,00		
			32.052.335,00	0,00	32.052.335,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja bahan pelatihan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.400.000,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja alat kesehatan habis pakai	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja alat ukur	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	74.907.700,00	92.300,00
			0,00	61.409.700,00	61.409.700,00		
			13.498.000,00	0,00	13.498.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.367.750.760,00	0,00	0,00	0,00	5.083.131.198,00	2.284.619.562,00
			4.515.850.681,00	413.087.648,00	4.928.938.329,00		
			129.677.386,00	24.515.483,00	154.192.869,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 4 dari 13

Printed By SimDi



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.485.000,00	3.015.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.485.000,00	0,00	4.485.000,00		
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	47.700.000,00	0,00	0,00	0,00	34.195.200,00	13.504.800,00
			0,00	0,00	0,00		
			27.350.500,00	6.844.700,00	34.195.200,00		
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	71.700.000,00	0,00	0,00	0,00	50.228.000,00	21.472.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			50.228.000,00	0,00	50.228.000,00		
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.13	Belanja jasa penyiaran	7.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.21	Belanja tenaga ahli/narasumber/instruktur/tenaga teknis lainnya	303.230.000,00	0,00	0,00	0,00	235.930.000,00	67.300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			203.630.000,00	32.300.000,00	235.930.000,00		
5.2.2.03.22	Belanja honorarium pegawai tidak tetap	4.978.530.000,00	0,00	0,00	0,00	4.897.800.000,00	80.730.000,00
			4.464.000.000,00	415.800.000,00	4.879.800.000,00		
			18.000.000,00	0,00	18.000.000,00		
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	219.567.550,00	0,00	0,00	0,00	209.543.494,00	10.024.056,00
			0,00	0,00	0,00		
			172.790.000,00	36.753.486,00	209.543.494,00		
5.2.2.04.04	Belanja premi asuransi jaminan kecelakaan kerja	32.385.747,00	0,00	0,00	0,00	22.709.644,00	9.676.103,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.769.348,00	2.940.296,00	22.709.644,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ) BELAKANG - FUNGSIONAL

Halaman 5 dari 13

Printed By: Sidiq



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja premi asuransi jaminan kematian	28.502.353,00	0,00	0,00	0,00	16.991.748,00	11.510.605,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.316.378,00	3.675.370,00	16.991.748,00		
5 . 2 . 2 . 04 . 06	Belanja premi asuransi jaminan hari tua	54.230.594,00	0,00	0,00	0,00	51.892.495,00	2.338.099,00
			0,00	0,00	0,00		
			51.892.495,00	0,00	51.892.495,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	211.448.998,00	0,00	0,00	0,00	79.443.500,00	132.005.498,00
			0,00	0,00	0,00		
			71.418.500,00	8.025.000,00	79.443.500,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	767.733.623,00	0,00	0,00	0,00	320.951.824,00	446.781.799,00
			0,00	0,00	0,00		
			277.903.824,00	43.048.000,00	320.951.824,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.805.925.268,00	0,00	0,00	0,00	2.388.973.496,00	2.416.951.772,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.977.328.546,00	411.644.950,00	2.388.973.496,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	113.350.000,00	0,00	0,00	0,00	26.781.600,00	86.568.400,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.781.600,00	0,00	26.781.600,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.894.100,00	25.805.900,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.894.100,00	0,00	6.894.100,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	151.345.500,00	0,00	0,00	0,00	123.430.500,00	27.915.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			101.975.500,00	21.455.000,00	123.430.500,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	124.176.550,00	0,00	0,00	0,00	109.589.700,00	14.586.850,00
			0,00	0,00	0,00		
			61.569.000,00	48.020.700,00	109.589.700,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SP) BELANJA - FUNGSIONAL

Printed By: Sireid

Halaman 6 dari 13



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.2.2.06.03	Belanja penjiwaan	40.591.000,00	0,00	0,00	0,00	18.395.000,00	22.196.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.890.000,00	16.505.000,00	18.395.000,00		
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.2.10.09	Belanja sewa sound system	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	980.040.000,00	0,00	0,00	0,00	705.295.000,00	274.745.000,00
			469.163.200,00	168.286.800,00	637.450.000,00		
			54.495.000,00	13.350.000,00	67.845.000,00		
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	222.630.000,00	0,00	0,00	0,00	177.921.000,00	44.709.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			99.903.000,00	76.018.000,00	177.921.000,00		
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.936.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	59.060.000,00	0,00	0,00	0,00	29.570.000,00	29.490.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.530.000,00	5.040.000,00	29.570.000,00		
5.2.2.12.04	Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH)	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	4.725.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.725.000,00	0,00	4.725.000,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ) BELANJA - FUNGSIONAL

Halaman 7 dari 13



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	423.726.000,00	0,00	0,00	0,00	341.601.254,00	82.124.746,00
			198.850.000,00	0,00	198.850.000,00		
			132.361.254,00	10.390.000,00	142.751.254,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	440.120.000,00	0,00	0,00	0,00	313.575.000,00	126.545.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			221.385.000,00	92.190.000,00	313.575.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	913.922.000,00	0,00	0,00	0,00	746.159.219,00	167.762.781,00
			0,00	0,00	0,00		
			581.212.156,00	164.947.063,00	746.159.219,00		
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Kepesertaan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	71.660.000,00	0,00	0,00	0,00	38.981.200,00	32.678.800,00
			0,00	0,00	0,00		
			31.981.200,00	7.000.000,00	38.981.200,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	452.247.394,00	0,00	0,00	0,00	442.461.000,00	9.786.394,00
			393.421.000,00	29.900.000,00	423.321.000,00		
			19.140.000,00	0,00	19.140.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	66.561.000,00	0,00	0,00	0,00	50.150.000,00	16.411.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.150.000,00	30.000.000,00	50.150.000,00		
5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.015.236.500,00	0,00	0,00	0,00	976.046.000,00	39.192.500,00
			919.548.000,00	56.498.000,00	976.046.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	87.200.000,00	0,00	0,00	0,00	87.175.000,00	25.000,00
			0,00	87.175.000,00	87.175.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNKSIONAL)

Halaman 8 dari 13



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.2.2.23.02	Belanja hadiah/penghargaan berupa uang	241.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500.000,00
5.2.2.29.04	Belanja pengadaan mesin pompa air	880.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	330.000,00
5.2.2.31.02	Belanja pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, speaker, battery, dll)	7.532.000,00	0,00	0,00	0,00	7.170.000,00	362.000,00
5.2.2.32.14	Belanja pengadaan papan nama/papan data	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.450.000,00
5.2.2.36.02	Belanja pengadaan kompas/peralatan navigasi	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.910.000,00	890.000,00
5.2.3.11.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	249.522.000,00	10.478.000,00
5.2.3.16.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.959.600,00	1.040.400,00
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	920.969.000,00	0,00	0,00	0,00	657.030.500,00	263.938.500,00
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.611.524.000,00	0,00	0,00	0,00	1.557.000.000,00	54.524.000,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 9 dari 13



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	87.200.000,00	2.800.000,00
			0,00	87.200.000,00	87.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 22 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las	36.100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.964.545,00	24.135.455,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.964.545,00	0,00	11.964.545,00		
5 . 2 . 3 . 23 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	850.000,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00	222.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			628.000,00	0,00	628.000,00		
5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	54.264.800,00	0,00	0,00	0,00	53.130.000,00	1.134.800,00
			53.130.000,00	0,00	53.130.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	50.755.000,00	0,00	0,00	0,00	23.130.000,00	27.625.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.875.000,00	12.255.000,00	23.130.000,00		
5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	14.566.464,00	0,00	0,00	0,00	11.526.000,00	3.040.464,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.526.000,00	0,00	11.526.000,00		
5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	290.300.000,00	0,00	0,00	0,00	280.815.000,00	9.485.000,00
			160.050.000,00	120.765.000,00	280.815.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	14.497.000,00	0,00	0,00	0,00	10.126.000,00	4.371.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.126.000,00	0,00	10.126.000,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - Fungsional)

Halaman 10 dari 13



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	94.820.000,00	180.000,00
			0,00	94.820.000,00	94.820.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	980.000,00	980.000,00		
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	42.474.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	1.474.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			41.000.000,00	0,00	41.000.000,00		
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.450.000,00	0,00	1.450.000,00		
5.2.3.42.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	513.800.000,00	0,00	0,00	0,00	475.745.000,00	38.055.000,00
			346.000.000,00	129.745.000,00	475.745.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.3.42.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	380.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	4.620.000,00	4.620.000,00		
5.2.3.42.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.995.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	5.995.000,00	5.995.000,00		
5.2.3.42.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	231.299.900,00	18.700.100,00
			231.299.900,00	0,00	231.299.900,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.3.42.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.060.000,00	4.940.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.210.000,00	30.850.000,00	38.060.000,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ) BELANJA - FUNGSIONAL

Halaman 11 dari 13



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	132.300.000,00	0,00	0,00	0,00	131.336.000,00	964.000,00
			0,00	119.100.000,00	119.100.000,00		
			0,00	12.236.000,00	12.236.000,00		
5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	132.300.000,00	0,00	0,00	0,00	131.570.000,00	730.000,00
			0,00	119.380.000,00	119.380.000,00		
			0,00	12.190.000,00	12.190.000,00		
5 . 2 . 3 . 49 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	182.500.000,00	0,00	0,00	0,00	181.480.000,00	1.020.000,00
			0,00	169.070.000,00	169.070.000,00		
			0,00	12.410.000,00	12.410.000,00		
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.950.000,00	0,00	0,00	0,00	29.001.450,00	1.948.550,00
			0,00	0,00	0,00		
			29.001.450,00	0,00	29.001.450,00		
5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	2.335.062.500,00	0,00	0,00	0,00	2.303.528.000,00	31.534.500,00
			2.105.843.000,00	194.025.000,00	2.299.868.000,00		
			0,00	3.660.000,00	3.660.000,00		
5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	4.427.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.326.784.100,00	100.965.900,00
			488.950.000,00	3.705.824.400,00	4.194.774.400,00		
			118.250.600,00	13.759.100,00	132.009.700,00		
5 . 2 . 3 . 88 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	26.475.000,00	2.025.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	26.475.000,00	26.475.000,00		
5 . 2 . 3 . 91 . 04	Belanja Modal Aset Lainnya - Kajian (DED)	68.500.000,00	0,00	0,00	0,00	66.029.000,00	2.471.000,00
			66.029.000,00	0,00	66.029.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
	JUMLAH	47.329.308.754,00	3.246.549.772,00	262.587.976,00	3.509.137.748,00	37.206.136.926,00	10.123.171.828,00
			18.610.418.102,00	7.820.544.508,00	26.430.962.610,00		
			5.924.636.770,00	1.341.399.798,00	7.266.036.568,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANDA - FUNGSIONAL)

Halaman 12 dari 13



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
				SPJ - LS Gaji	SPJ - LS Barang & Jasa		
Penerimaan							
-	SP2D	37.595.501.981,00					
-	Pajak Penghasilan Ps 21	11.264.750,00					
-	Pajak Penghasilan Ps 22	52.807.810,00					
-	Pajak Penghasilan Ps 23	26.779.666,00					
-	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	235.309.279,00					
-	Lain-lain	0,00					
	Jumlah Penerimaan	37.921.663.486,00					
Pengeluaran							
-	SPJ (LS + UP/GU/TU)	37.207.936.926,00					
-	Pajak Penghasilan Ps 21	11.264.750,00					
-	Pajak Penghasilan Ps 22	52.807.810,00					
-	Pajak Penghasilan Ps 23	26.779.666,00					
-	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	235.309.279,00					
-	Lain-lain	387.565.055,00					
	Jumlah Pengeluaran	37.921.663.486,00					
	Saldo Kas	0,00					

Mengeluarkan,
 Pemahaman Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lin

Ir. H. Muhammad Muray, M.Si
 NIP. 196803011998031009

Pelaksana,
 BENDAHARA PENGELUARAN

RISNAWATI PORRY, A.Md.Pik
 NIP. 196207102010012001

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SP) BELANJA - FUNGSIONAL
 Halaman 13 dari 13



6 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

6.1. PENDAHULUAN

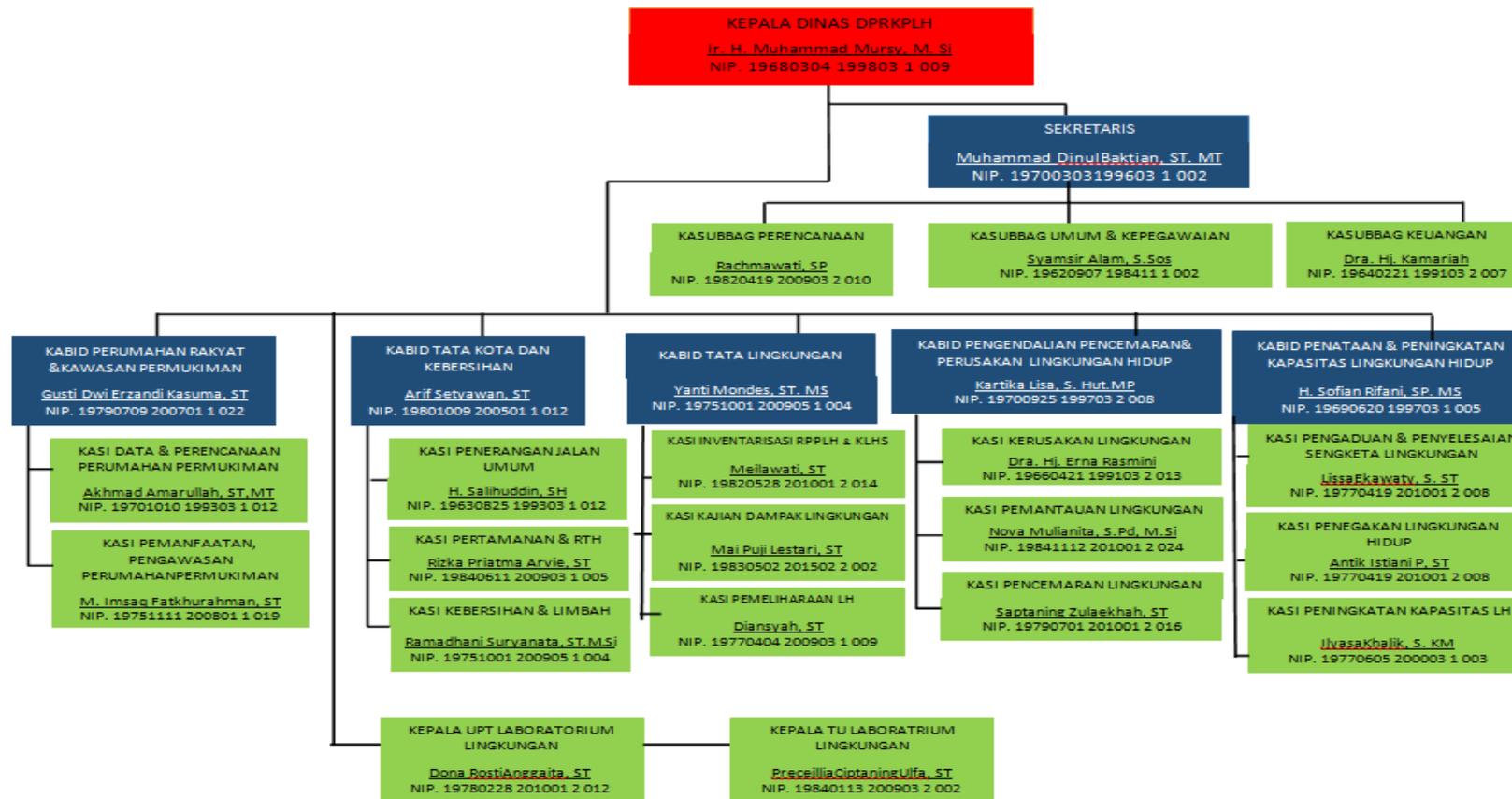
6.1.1. Data Umum

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu dinas yang berada di daerah kabupaten tanah laut tepatnya Jl. A. Syukri Kompleks Gagas Permai Pelaihari. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut adalah gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Kota Kebersihan dan Badan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut yang bergabung pada pertengahan tahun 2017.



6.1.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut tahun 2019 adalah





A. Visi

1. Visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

“Terwujudnya Pembangunan Tanah Laut yang berkarakter, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.

B. Misi

1. Mewujudkan kualitas kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan dengan meningkatkan peran serta dunia usaha, sekolah dan masyarakat.
2. Mewujudkan perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman.

C. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kota yang indah, bersih dan nyaman.
2. Terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat dan menurunnya kerusakan pencemaran lingkungan.
3. Terwujudnya rumah sehat dan layak huni.
4. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien.

D. Sasaran Strategis

Sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan.
2. Meningkatnya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup.
3. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah.
5. Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
6. Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)



7. Meningkatnya pelayanan kebersihan, kenyamanan jalan umum dan keindahan.
8. Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
9. Peningkatan kualitas SDM SKPD.
10. Pelayanan Administrasi Keuangan.

E. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Belanja Langsung yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- g. Penyediaan alat tulis kantor
- h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
- m. Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD



2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kegiatan :

- a. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah.
- b. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- c. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- d. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
- e. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DAK)

4. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan :

- a. Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan.

5. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Kegiatan :

- a. Peningkatan rumah sederhana.
- b. Peningkatan rumah sederhana (DAK)

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan :

- a. Pelaksanaan penilaian kota sehat/Adipura.
- b. Pemantauan Kualitas Lingkungan.
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup.
- d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3.



- e. Pengkajian dampak lingkungan.
- f. Penyusunan AMDAL
- g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
- h. Pengembangan laboratorium lingkungan
- i. Pengujian dan pelayanan laboratorium lingkungan
- j. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Lingkungan hidup
- k. Pengujian dan pelayanan laboratorium lingkungan (DAK)

7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kegiatan :

- a. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

8. Program kerjasama informasi dengan mas media

Kegiatan :

- a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

Kegiatan :

- a. Penyusunan tabulasi data aset tetap

10. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Kegiatan :

- a. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
- b. Rehabiltasi/pemeliharaan jalan lingkungan.

11. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan :

- a. Pengembangan data dan informasi lingkungan



12. Program peningkatan pengendalian polusi.

- a. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
- b. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

13. Program peningkatan sarana dan prasarana keindahan kota

- a. Pemeliharaan jaringan dan penerangan jalan umum
- b. Penyediaan sarana dan prasarana keindahan kota

6.1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan..

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.



b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Lingkungan Hidup untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut ;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut ;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan .

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan;
- e. belanja;



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Komponen laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan
4. Laporan Operasional
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Catatan atas Laporan Keuangan

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan *outcome* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut .



6.1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- v. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- w. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- x. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang Berbasis Akrual yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 178 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang Berbasis Akrual.

**6.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR
PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**



6.2.1. Ekonomi Makro

Asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 antara lain :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau barang/jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat dilihat dari Kondisi PDRB Kabupaten Tanah Laut mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

c. Tingkat inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi ditandai dengan keadaan dimana harga-harga meningkat secara terus menerus, naiknya biaya produksi, serta permintaan barang/jasa yang meningkat. Juga Nilai kurs yang stabil akan menggairahkan perekonomian, karena mengurangi gejolak naik turunnya harga barang/jasa di masyarakat. Nilai kurs di tahun 2019 relatif stabil/fluktuatif, sehingga mendorong ekonomi pasar.

6.2.2. Kebijakan Keuangan

6.2.2.1. Kebijakan Pendapatan

1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.



2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

6.2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah

Yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan. Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut berada pada katagori urusan wajib Pelayanan Dasar, yaitu pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut .(Sesuai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

6.2.2.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan. Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) , Neraca dan CaLK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

6.2.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 (setelah Perubahan APBD)



ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 81.005.000,00 dan anggaran belanja sebesar Rp. 47.329.308.754,00 serta anggaran Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2019 terdiri dari realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 81.280.000,00 dan belanja sebesar Rp. 37.206.136.926,00 .

Pencapaian target kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 tercapai 100%, serta tidak terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

6.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Kebijakan Akuntansi adalah akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dimulai pertama kalinya tahun 2015

6.3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut adalah unit pengguna anggaran dan unit pengguna barang yang merupakan **entitas akuntansi** keuangan daerah.

Sebagai entitas akuntansi, Pengguna Anggaran menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada SKPD untuk digabung menjadi laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah.

6.3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan

Dalam penyajian Laporan Keuangan, basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana, dengan uraian berikut.



- a. Basis kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- b. Basis akrual untuk perkiraan-perkiraan laporan operasional dan neraca yang berarti bahwa pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

6.3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian dari SKPD Kabupaten Tanah Laut menggunakan basis pengukurannya berpedoman pada Kebijakan Akuntansi dan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta Lampirannya. Kebijakan basis pengukuran di atas sebagai dasar penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah.

a. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pengukuran Pendapatan

1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening entitas akuntansi atau saat diterima oleh Bendahara Penerima.
2. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya.

Pengukuran Belanja

1. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
2. Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.



Penilaian

Seluruh komponen pendapatan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pendapatan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pendapatan.

6.3.4. Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Belanja diakui pada saat munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut berupa penerbitan SPM.
- 2) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Pengembalian kas atas pengeluaran yang sudah diakui sebagai belanja pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang belanja;
- 4) Pengembalian kas atas pengeluaran yang sudah diakui sebagai belanja pada tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Batasan Minimal Nilai Kapitalisasi suatu Belanja Menjadi Aset Tetap

Realisasi Belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya melalui penetapan batas minimal (*Threshold Capitalization*). Pengeluaran pengadaan dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk persatuan jenis aset tetap sesuai kebijakan akuntansi belanja, sebagai berikut.

- 1) Tidak ada batasan perolehan untuk tanah, berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;



- 2) Perolehan untuk peralatan dan mesin dikapitalisasi dari nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keatas;
- 3) Perolehan untuk gedung dan bangunan dikapitalisasi dari nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) keatas;
- 4) Tidak ada batasan perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
- 5) Pengeluaran untuk aset tetap lainnya dikapitalisasi dari nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pengukuran

Seluruh komponen belanja dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai pengeluaran kas atas belanja atau nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian

Seluruh komponen belanja diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai belanja maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan belanja.

6.3.5 Akuntansi Anggaran, Akuntansi Surplus/Defisit dan Akuntansi Non Anggaran

Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.



Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 tentang perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, kemudian di Tahun 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tersebut di atas terjadi perubahan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Akuntansi Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

Akuntansi Non Anggaran

Akuntansi non anggaran merupakan teknik pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dimana dalam beberapa hal dapat terkait dengan pengakuan pos-pos aset, utang dan ekuitas dana. Akuntansi non anggaran diselenggarakan dengan menggunakan pos-pos diluar struktur anggaran seperti pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan.

Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;



- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan.
- 4) Ekuitas Akhir
- 5) Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6.3.6 Akuntansi Persediaan

Persediaan merupakan aset yang berwujud, yang dapat dirumuskan sebagai:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam angka kegiatan operasional pemerintah;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki secara swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.



Pengukuran

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Penilaian

Seluruh komponen persediaan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai persediaan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan persediaan.

6.3.7. Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi jangka pendek diakui apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut.



- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 3) Berisiko rendah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut.



Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah berupa penerimaan pembiayaan yang dikorolari sebagai pengurangan nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk



dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

6.3.8. Akuntansi Piutang

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat di realisasi (*net realized value*).

Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Prosedur akuntansi piutang meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

Terhadap semua piutang baik yang telah diatur oleh peraturan daerah seperti pajak dan retribusi maupun yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah misalnya piutang BLUD, perikatan, penjualan, kerjasama, dan lain-lain untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk piutang yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih ditentukan dengan menggunakan umur piutang yang ditentukan berdasarkan umur piutang sejak jatuh tempo sebagai berikut.

NO	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG	KATEGORI
1	0-<1 Tahun	0,50%	lancar
2	1-2 Tahun	30%	Kurang lancar
3	>2-3 tahun	50%	Diragukan
4	>3 tahun	100%	Macet

6.3.9. Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol/pasti.



4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dilaksanakan seluruhnya.

7) Aset Lainnya

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai bukunya.

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan metode tersebut tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Apabila aset tetap telah habis disusutkan, namun aset tersebut masih bisa dimanfaatkan maka akan dilakukan penilaian kembali dan akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan bulanan dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Aset yang di peroleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai sisa masa manfaatnya.
- 2) Aset yang diperoleh setelah neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Penambahan masa manfaat atas aset tetap renovasi dan overhaul pada tabel masa manfaat dilakukan untuk aset tetap renovasi dan overhaul yang diperoleh setelah tahun anggaran 2014. Pengeluaran modal yang menambah masa manfaat ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan, artinya pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap tetap yang bersangkutan.

Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh.

Aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya.



Aset Donasi

Aset donasi didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perolehan aset donasi.

Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

6.3.10. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



6.3.11. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

6.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

6.4.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

6.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2019 yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 81.280.000,00 yang berasal dari PAD (Pendapatan Retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah) dan Bila dibandingkan dengan anggaran pendapatan asli daerah tahun 2018 yaitu sebesar Rp 74.431.500,00 yang terdiri dari pendapatan retribusi daerah Rp. 73.681.500,00 dan dari Lain-lain PAD yang sah Rp. 750.000,00 dan Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2019 adalah sebesar Rp. 75.275.000,00 dan Lain-lain PAD yang sah Rp. 6.005.000,00 di atas merupakan realisasi penerimaan kas atas retribusi daerah 2019 yang seluruhnya telah disetorkan ke Kas Daerah.

Rincian anggaran dan realisasi tahun 2019 terdiri dari:

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
▪ Pendapatan Retribusi Daerah	Rp. 75.000.000,00	Rp.75.275.000,00	100,37	Rp. 73.681.500,00
▪ Lain-lain PAD yang sah	Rp. 6.005.000,00	Rp 6.005.000,00	100,00	Rp. 750.000,00
Jumlah	Rp. 81.005.000,00	Rp. 81.280.000,00	100,34	Rp. 74.431.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

6.4.1.2 Belanja

Anggaran Belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut Tahun 2019 sebesar Rp. 37.206.136.926,00 meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut Tahun 2019 sebagai berikut :

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018	%
	Anggaran	Realisasi			
1. Belanja Operasi (BO)	Rp. 35.680.866.990,00	Rp. 26.170.931.831,00	73,35	Rp. 22.358.102.773,00	76,87
2. Belanja Modal (BM)	Rp. 11.648.441.764 ,00	Rp. 11.035.205.095,00	94,74	Rp. 5.398.148.117,00	81,93
Jumlah	Rp. 47.329.308.754,00	Rp. 37.206.136.926,00	78,61	Rp. 27.756.250.890,00	77,80

Jumlah realisasi belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut Tahun 2019, dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Anggaran dan realisasi belanja operasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut Tahun 2019 terdiri dari:

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018	%
	Anggaran	Realisasi			
a)Belanja Pegawai	Rp. 9.257.356.598,00	Rp. 6.999.979.054 ,00	75,62	Rp. 4.441.005.160,00	82,42
b)Belanja Barang dan Jasa	Rp.26.423.510.392,00	Rp.19.170.952.777 ,00	72,55	Rp. 17.917.097.613,00	75,61
Jumlah	Rp. 35.680.866.990,00	Rp.26.170.931.831,00	73,35	Rp. 22.358.102.773,00	76,87

Realisasi Belanja Operasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 **Rp. 26.170.931.831,00** atau **73,35%** dari anggarannya sebesar **Rp. 35.680.866.990,00**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut :

a). Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018	(%)
	Anggaran	Realisasi			
a)					
Gaji & Tunjangan					
Gaji Pokok/Uang Representasi	Rp.3.805.200.000	Rp. 2.706.344.400	71,22	Rp. 2,437,881,000	83.74
Tunjangan Keluarga	Rp. 536.760.000	Rp. 306.778.706	57,15	Rp. 277,340,562.	64.81
Tunjangan Jabatan *)	Rp. 312.641.560	Rp. 222.460.000	71,15	Rp. 232,330,000	78.02
Tunjangan Fungsional	Rp. 9.800.000	Rp. 0,00	0,00	Rp. 1,550,000.	17.03
Tunjangan Fungsional Umum	Rp. 112.560.000	Rp. 95.250.000	84,62	Rp. 84,060,000.	98.02
Tunjangan Beras *)	Rp. 205.380.000	Rp. 174.532.200	84,98	Rp. 163,451,940	58.72
Tunjangan PPh / Khusus	Rp. 72.660.000	Rp. 3.726.459	5,12	Rp. 2,583,148	3.58
Pembulatan Gaji	Rp. 140.000	Rp. 45.983	32,84	Rp. 36,510	48.29
b)					
Tambahan Penghasilan Beban Kerja	Rp. 4.202.215.038	Rp. 3.490.841.306	83,07	Rp. 1,241,772,000	95.05
Jumlah	Rp.9.257.356.598	Rp. 6.999.979.054	75,62	Rp.4,441,005,160	82.42

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 6.999.979.054** atau **75,62%** dari anggarannya sebesar **Rp.9.257.356.598**

b). Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Pakai habis, Bahan & material, Jasa kantor, Belanja Premi Asuransi, Perawatan Kendaraan Bermotor, Cetak dan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Penggandaan, Sewa Peralatan dan Perlengkapan kantor, Belanja makanan & Minuman, Belanja makanan & Minuman, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja Lapangan, Perjalanan dinas, Kepesertaan, Pemeliharaan, Pengadaan kelengkapan komputer, Belanja jasa Konsultasi, Belanja Hibah, Pakaian Batik Tradisional, Belanja Honorarium PNS, Belanja Honorarium Non PNS, Belanja Pengadaan Peralatan Kantor, Belanja Pengadaan mebeulair, Belanja Pengadaan Alat-alat Ukur, Belanja hadiah/penghargaan berupa uang dengan anggaran/realisasi Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut

Keterangan		2019		%	Realisasi 2018	%
		Anggaran	Realisasi			
a)	Belanja Pakai habis	Rp.1.348.957.555	Rp. 1.237.122.050	91,71	Rp.1,343,895,95	90,86
b)	Bahan & material	Rp. 375.487.000	Rp. 285.549.555	76,05	Rp. 299,968,400	96,28
c)	Jasa kantor	Rp.12.791.255.760	Rp.10.305.769.398	80,57	Rp.9,687,342,670	85,84
d)	Belanja Premi Asuransi	Rp. 334.686.244	Rp. 30.1137.381	89,98	0,00	0,00
e)	Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp. 5.931.157.889	Rp. 2.823.044.520	47,60	Rp.2,114,262,827	38,46
f)	Cetak dan Penggandaan	Rp.316.113.050	Rp . 251.415.200	79,53	Rp.114,121,050.	65,54
g)	Sewa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp.6.900.000	Rp 0,00.	0,00	Rp. 0,00	0,00
h)	Belanja makanan & Minuman	Rp.1.274.666.000	Rp. 912.786.000	71,61	Rp. 530,978,000	81,10
i)	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp. 4.725.000	Rp. 4.725.000	100	Rp. 0,00	0,00
j)	Pakaian Kerja Lapangan	Rp. 423.726.000.	Rp. 341.601.254.	80,62	Rp. 311,014,773	78,19
k)	Perjalanan dinas	Rp.1.354.042.000	Rp. 1.059.734.219	78,26	Rp. 908,259,835	91,41
l)	Kepesertaan	Rp 7.000.000.	Rp. 0,00	0,00	Rp. 2,500,000.	17,85



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

m)	Pemeliharaan	Rp. 590.468.394	Rp. 531.592.200	90,03	Rp. 999,885,000	93.69
n)	Belanja jasa Konsultasi	Rp.1.102.238.500	Rp. 1.063.221.000	96,44	Rp1,109,180,38	96.56
o)	Pengadaan kelengkapan komputer	Rp. 7.532.000	Rp. 7.170.000	95,19	Rp. 5,877,727.00	94.04
p)	Belanja Hibah	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00
q)	Pakaian Batik Tradisional	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 12,150,000	100
r)	Belanja Honorarium PNS	Rp. 31.650.000	Rp. 4.075.000	12,87	Rp. 477,661,000	73.42
s)	Belanja Honorarium Non PNS	Rp. 268.525.000	Rp. 32.000.000	11,91	Rp. 0,00	0,00
t)	Belanja Pengadaan Peralatan Kantor	Rp. 880.000	Rp. 550.000	62,50	Rp. 0,00	0,00
u)	Belanja Pengadaan mebeulair	Rp. 3.000.000	Rp. 1.550.000	51,67	Rp. 0,00	0,00
v)	Belanja Pengadaan Alat-alat Ukur	Rp. 8.800.000	Rp. 7.910.000	89,89	Rp. 0,00	0,00
w)	Belanja hadiah/penghargaan berupa uang	Rp. 241.500.000	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00	0,00
Jumlah		Rp.26.423.510.392	Rp. 19.170.952.777	72,55	Rp.17,917,097,613	75,61

c). Belanja Modal (BM)

Rekening ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset tetap. Belanja Modal Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 meliputi pengadaan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Keterangan	2019		%	Realisasi	%
	Anggaran	Realisasi		2018	
(1) Belanja Modal Tanah	Rp. 260.000.000	Rp. 249.522.000	95,97	Rp. 0,00	0,00
(2) Peralatan dan Mesin	Rp.4.050.579.264	Rp. 3.589.479.545	88,62	Rp. 754.739.607,00	56,06
(3) Gedung dan Bangunan	Rp. 478.050.000	Rp. 473.387.450	99,02	Rp. 632.510.000,00	74,40
(4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 6.762.812.500	Rp. 6.630.312.100	98,04	Rp. .3.769.205.510,00	91,18
(5) Aset Tetap Lainnya	Rp. 28.500.000	Rp. 26.475.000	92,89	Rp. 35.920.000,00	70,85
(6) Aset Lainnya	Rp. 68.500.000	Rp. 66.029.000	96,39	Rp. 205.773.000,00	66,05
Jumlah	Rp.11.648.441.764	Rp. 11.035.205.095	94,74	Rp. 5.398.148.117,00	81,93

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 11.035.205.095,00** atau **94,74%** dari anggarannya sebesar **Rp. 11.648.441.764,00** Selanjutnya atas anggaran/realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2019, dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018	%
	Anggaran	Realisasi			
Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	Rp. 260.000.000	Rp. 249.522.000	95,97	Rp. 0,00	0,00
Jumlah	Rp. 260.000.000	Rp.249.522.000.	95,97	Rp. 0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Keterangan	2019		%	Realisasi	%
	Anggaran	Realisasi		2018	
a. Pengadaan Alat-alat Bantu	Rp. 4.000.000	Rp 2.959.600	73,99	Rp. 32727405	85,45
b. Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 2.532.493.000	Rp.2.214.030.500	87,42	Rp. 70.400.000	98,59
c. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp. 90.000.000	Rp. 87.200.000	96,89	Rp. 130.850.000	99,12
d. Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	Rp. 36.100.000	Rp. 11.964.545	33,14	Rp. 70.400.000	98,76
e. Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp. 850.000	Rp. 628.000	73,88	Rp. 130.850.000	99,12
f. Pengadaan Alat Ukur	Rp. 54.264.800	Rp. 53.130.000	97,91	Rp. 14.900.000	90,38
g. Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	Rp. 50.755.000	Rp. 23.130.000	45,57	Rp. 61.785.000	96,42
h. Pengadaan Alat Rumah Tangga	Rp. 420.392.464	Rp. 398.267.000	94,74	Rp. 249.599.952	85,83
i. Pengadaan Komputer	Rp. 43.924.000	Rp. 42.450.000	96,64	Rp. 41.180.000	93,47
j. Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp. 817.800.000	Rp. 755.719.900	92,41	Rp. 9.950.000	98,47
Jumlah	Rp.4.050.579.264	Rp. 3.589.479.545	88,62%	Rp. 754.739.607,00	56,06

3. Belanja Modal Gedung & Bangunan

Keterangan	2019		%	Realisasi	%
	Anggaran	Realisasi		2018	
Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	Rp. 132.300.000	Rp. 131.336.000	99,27	Rp.111,805,000.00	34.79



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Rp. 132.300.000	Rp. 131.570.000	99,45	Rp. 29,006,000.00	100
Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	Rp. 182.500.000	Rp. 181.480.000	99,44	Rp. 34,640,000.00	98,77
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp. 30.950.000	Rp. 29.001.450	93,70	Rp.457,059,000.00	98,33
Jumlah	Rp. 478.050.000	Rp. 473.387.450	99,02	Rp.632.510.000,00	74,40

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018	
	Anggaran	Realisasi			%
Pengadaan Jalan	Rp. 2.335.062.500	Rp.2.303.528.000	98,65	Rp. 2.130/768.510	86,20
Pengadaan Jaringan Listrik	Rp. 4.427.750.000	Rp. 4.326.784.100	97,72	Rp. 1,638,437,000	98,58
Jumlah	Rp. 6.762.812.500	Rp.6.630.312.100	98,04	Rp. 3.769.201.510	91,18

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018	
	Anggaran	Realisasi			%
Pengadaan Tanaman	Rp. 28.500.000	Rp. 26.475.000	92,89	Rp.35,920,000.00	70,85
Jumlah	Rp. 28.500.000	Rp. 26.475.000	92,89	Rp. 35,920,000.00	70,85

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Keterangan	2019		%	Realisasi 2018	
	Anggaran	Realisasi			%
Kajian (DED)	Rp.68.500.000	Rp.66.029.000	96,39	Rp. 205,773,000.00	98,93%



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Jumlah	Rp.68.500.000	Rp.66.029.000	96,39	Rp. 205,773,000.00	98.93
--------	---------------	---------------	-------	--------------------	-------

6.4.2. KOMPONEN NERACA

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Kas di Kas Dinas		
6.4.2.1 Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar **Rp 0,00** dan **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
	Rekening Giro :		
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00	Rp. 0,00
2	Bank Kalsel Cab. TALA No. Rek. 007 00 00438 8	Rp. 0,00	Rp. 0,00
	Jumlah	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 0,00 karena sisa uang persediaan Tahun Anggaran 2019, telah disetor Ke Kas Daerah tanggal 27 Desember 2019

6.4.2.2 Aset Lancar

Saldo Aset lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp. **253.733.300,00** dan **Rp. 391.606.175,00** yaitu :

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Aset Lancar	127.572.195,54	391.606.175,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp. 127.572.195,54 dan Rp. 391.606.175,00 terdiri atas:



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Piutang Pendapatan	0,00	0,00
2..	Piutang Lainnya	709.091,00	6.005.000,00
3.	Penyisihan Piutang	(3.545,46)	(30,025)
4	Beban Diayar Dimuka	0,00	0,00
5	Persediaan	126.866.650,00	385.631.200,00
	Jumlah	127.572.195,54	391.606.175,00

6.4.2.3 Aset Tetap

Saldo Aset tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar **Rp. 124.843.679.461,25** dan **Rp. 139.659.549.754.32** dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Tanah	31.423.364.900,00	54.732.067.940,00
Peralatan dan Mesin	27.437.554.374,89	23.738.833.652,89
Gedung dan Bangunan	27.934.725.427,08	28.565.179.938,15
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	87.806.091.662,36	81.333.201.662,37
Aset Tetap Lainnya	493.778.100,00	467.303.100
Kontruksi dalam Pengerjaan	344.371.500,00	264.806.000
Akumulasi dalam penyusutan	(49.441.842.539,09)	(49.441.842.539,09)
Jumlah	125.998.043.425,24	139.659.549.754,32

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Tanah	31.423.364.900,00	54.732.067.940,00

Saldo Tanah Per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar **Rp. 31.423.364.900,00** dan **Rp. 54.732.067.940,00** terjadi penurunan sebesar Rp. (23.308.703.040,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Dengan perhitungan sebagai berikut :

- Saldo Awal 2019 Rp. 54.732.067.940,00

Penurunan

Belanja Modal Tanah

- Hutan Untuk Penggunaan Khusus Rp. (23.558.225.040,00)

- Penambahan

Belanja Modal Tanah

- Tanah Kosong Rp. 249.522.000

	31 Desember 2019	31 Desember
	(Rp)	2018
		(Rp)
Peralatan dan Mesin	27.437.554.374,89	23.738.833.652,89

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar

Rp. 27.437.554.374,89 dan **Rp 23.738.833.652,89** terdapat penambahan saldo peralatan dan mesin pada tahun 2019 pada Belanja Modal yaitu sebesar Rp. **3.698.720.722,00**

- Saldo Awal 2019 Rp. 23.738.833.652,89
- Penambahan

Belanja Peralatan dan Mesin	
- Alat-alat Bantu Alat Penarik	Rp. 1.718.000
- Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp. 133.666.686
- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp. 657.030.500
- Kendaraan Bermotor Khusus	Rp. 1.557.000.000
- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp. 87.200.000
-Perkakas Konstraksi Logam yang Berpindah	Rp. 3.712.363
-Peralatan Las	Rp. 6.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

<i>-Perkakas Bengkel Konstraksi Logam</i>	Rp.	693.273
<i>-Perkakas Bengkel Listrik</i>	Rp.	628.000
<i>- Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman</i>	Rp.	11.655.000
<i>-Alat Pemeliharaan Tanaman</i>	Rp.	500.000
<i>-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor</i>	Rp.	22.926.000
<i>-Alat Kantor Lainnya</i>	Rp.	7.210.000
<i>-Alat Pembersih</i>	Rp.	8.800.000
<i>-Alat Pendingin</i>	Rp.	10.126.000
<i>-Alat Rumah Tanggal Lainnya (Home Use)</i>	Rp.	280.815.000
<i>-Alat Pemadam Kebakaran</i>	Rp.	980.000
<i>-Personal Komputer</i>	Rp.	17.950.000
<i>-Peralatan Personal Komputer</i>	Rp.	24.500.000
<i>-Peralatan Studio Video dan Film</i>	Rp.	53.130.000
<i>-Alat laboratorium Umum</i>	Rp.	69.960.000
<i>-Alat Laboratorium Kimia</i>	Rp.	24.860.000
<i>-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah</i>	Rp.	420.855.000
<i>-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran</i>	Rp.	10.615.000
<i>-Laboratorium Lingkungan</i>	Rp.	271.229.900
<i>-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Penunjang</i>	Rp.	14.960.000

	31 Desember 2019	31 Desember
	(Rp)	2018
		(Rp)
Gedung dan Bangunan	<u>27.934.725.427,08</u>	<u>28.565.179.938.15</u>



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp. 27.934.725.427,08 dan Rp. 28.565.179.938.15 , terdapat penurunan saldo Gedung dan Bangunan pada tahun 2019 yaitu Sebesar Rp (630.454.511)

Dengan perhitungan sebagai berikut :

- Saldo Awal 2019 Rp. 28.565.179.938.15
- Penambahan

Belanja Modal Tanah	
- Bangunan Gedung Kantor	Rp. 131.336.000
- Bangunan Gedung Laboratorium	Rp. 28.709.100
- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp. 469.850.000
- Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	Rp. 181.480.000
- Bangunan Gedung Garasi/Pool	Rp. 263.775.000
- Bangunan Kandang Hewan/Ternak	Rp. (26.902.500)
- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp. (32.506.550)
- Tugu Pembangunan	Rp. 325.440.973
- Tugu/Tanda Batas	Rp. (4.988.900)
- Bangunan Pembakaran Sampah Organik/Non Organik	Rp. (45.782.266,67)
- Bangunan Taman Rekreasi / Objek Wisata	Rp.(2.160.007.367,40)
- Bangunan Sarana / Prasarana Lainnya	Rp. 239.142.000

	31 Desember 2019	31 Desember
	(Rp)	2018
		(Rp)
Jalan, Irigasi, dan		
Bangunan	87.806.091.662,36	81.333.201.662.37



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Saldo Jalan, Irigasi, dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp. 87.806.091.662,36 dan Rp. 81.333.201.662.37 , terdapat Penambahan saldo Jalan, Irigasi, dan Bangunan pada tahun 2019 yaitu Sebesar Rp. 6.472.890.000

- Saldo Awal 2019 Rp. 81.333.201.662.37

- Penambahan

Belanja Modal Tanah

- Jalan Khusus Rp. 2.159.865.000

- Jaringan Transmisi Rp. (4.759.100)

- Jaringan Distribusi Rp. 4.317.784.100

	31 Desember	31 Desember
	2019	2018
	(Rp)	(Rp)
Aset Tetap Lainnya	493.778.100	467.303.100

Saldo Aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp. 493.778.100 dan Rp. 467.303.100 , terdapat Penambahan saldo Aset tetap lainnya pada tahun 2019 yaitu Sebesar Rp. 26.475.000

- Saldo Awal 2019 Rp. 467.303.100

- Penambahan

Belanja Modal Tanah

- Tanaman Hias Rp. 26.475.000

	31 Desember	31 Desember
	2019	2018
	(Rp)	(Rp)
Konstruksi dalam pengerjaan	344.371.500	264.806.000



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp. 344.371.500 dan Rp. 264.806.000 terdapat Penambahan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2019 yaitu Sebesar Rp. 79.565.500

- Saldo Awal 2019 Rp. 264.806.000
- Penambahan

Belanja Modal Tanah

- Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
Rp. 79.565.500

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Akumulasi Penyusutan		
Aset Tetap	(49.441.842.539,09)	(49.441.842.539,09)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap milik SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab.. Tanah Laut sampai dengan tanggal neraca. Penyusutan terhadap Aset Tetap pertama kali diterapkan pada tahun buku 2017 dan jumlah akumulasi penyusutan untuk tahun 2018 sebesar **Rp. (49.441.842.539,09)** sedangkan jumlah akumulasi penyusutan untuk tahun 2019 **Rp. (49.441.842.539,09)** yang ada pada neraca SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab.. Tanah Laut sesuai dengan jumlah yang ada belum merupakan jumlah Akumulasi Penyusutan Tahun 2019.

	31 Desember 2019	31 Desember
	(Rp)	2018
		(Rp)
Jumlah Ekuitas Dana	126.215.442.373,98	140.140.982.682,52



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	126.215.442.373,98	140.140.982.682,52

6.4.3. PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

A. Penyajian LO Tahun Anggaran 2018

Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut menyajikan LO.

B. Pendapatan-LO

Pendapatan LO SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Izin gangguan/HO dan Pelayanan Laboratorium untuk tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut.

NO.	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	75.275.000,00	73.681.500,00
2.	Lain-lain PAD Yang Sah	709.091,00	0,00
	JUMLAH	75.984.091,00	73.681.500,00

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 dan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

2018 adalah Rp. 75.984.091,00 dan Rp. 73.681.500,00 dari Pendapatan Retribusi Daerah terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.593.500,00 dari saldo tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

2. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pos ini menggambarkan realisasi lain-lain pendapatan yang sah untuk periode Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut.

NO.	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018
1.	Pendapatan Hibah	0,00	745.038.200,00
	JUMLAH	0,00	745.038.200,00

Rincian realisasi lain-lain pendapatan yang sah Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah Rp. 0,00 dan Rp. 745.038.200,00 terjadi penurunan sebesar Rp. (745.038.200) dari saldo tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

Pendapatan – LO Saldo 2019 Sebesar Rp. 75.984.091,00 dibandingkan dengan Saldo 2018 Sebesar Rp. 818.719.700,00 dengan mengalami penurunan sebesar Rp. (742.735.609,00) atau 90,72%

C. Beban

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

NO	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	Kenaikan/Penurunan
1	Beban Pegawai	6.999.979.054,00	4.441.005.160,00	2.558.973.894,00
2	Beban Barang dan Jasa	19.429.717.327,00	20.159.863.663,00	(730.146.336,00)
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	9.644.620.919,00	(9.644.620.919,00)
4	Penyisihan Piutang	3.545,54	30.025,00	(26.479,54)
	JUMLAH	26.429.699.926,46	34.245.519.767,00	(7.815.819.840,54)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Rincian lebih lanjut mengenai Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut.

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai terdiri atas beban sebagai berikut.

NO	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018
1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	2.706.344.400	2.437.881.000
2	Beban Tunjangan Keluarga	306.778.706	277.340.562
3	Beban Tunjangan Jabatan	222.460.000	232.330.000
4	Beban Tunjangan Fungsional		1.550.000
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum	95.250.000	84.060.000
6	Beban Tunjangan Beras	174.532.200	163.451.940
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.726.459	2.583.148
8	Beban Pembulatan Gaji	45.983	36.510
9	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.490.841.306	1.241.772.000
	Jumlah	6.999.979.054	4.441.005.160

2. Beban Barang dan Jasa

No	Jenis Beban Barang dan Jasa	SALDO 2019	SALDO 2018
1	Beban Belanja Pakai habis	1.326.638.200	1.174.022.600
2	Beban Persediaan Bahan/ material	306.506.955	484.005.900
3	Beban Jasa kantor	5.407.969.398	9.039.239.543
4	Beban Premi Asuransi	301.137.381	272.403.128
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	2.823.044.520	2.014.266.727
6	Beban Cetak dan Penggandaan	251.415.200	114.121.050
7	Beban Belanja makanan & Minuman	912.786.000	530.978.000
8	Beban pakaian Kerja	341.601.254.	311.014.773
9	Beban pakaian khusus hari tertentu	0,00	12.150.000
10	Beban perjalanan dinas	1.059.734.219	908.259.835
11	Beban Kursus Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	2.500.000



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

No	Jenis Beban Barang dan Jasa	SALDO 2019	SALDO 2018
12	Beban pemeliharaan	531.592.200	999.885.000
13	Beban jasa Konsultasi	1.063.221.000	1.109.180.380
14	Beban honorarium PNS	4.075.000	475.661.000
15	Beban honorarium Non PNS	4.929.800.000	377.700.000
16	Beban Pengadaan komputer	7.170.000	3.250.000
17	Beban pengadaan alat-alat ukur	7.910.000	2,627,727.00
18	Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat /pihak ketiga	148.291.000	2114298.000
19	Beban Pengadaan Peralatan Kantor	550.000	0,00
20	Beban Pengadaan mebeulair	1.550.000	1.500.000
21	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	210.000.000
22	Beban Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	0,00	2.800.000
23.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	4.725.000	0,00
Jumlah		19.429.717.327,00	20.159.863.663

3. Beban Penyisihan Piutang

NO.	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018
1.	Beban Penyisihan Piutang	3.545,46	30.025,00
	JUMLAH	3.545,46	30.025,00

Surplus/Defisit Dari Operasi saldo 2019 dan 2018 adalah (26.353.715.835,46) dan (33.426.800.067,00)

Kegiatan Non Operasional

NO.	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018
1.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	189.397.520,07	123.541.721,00
	JUMLAH	189.397.520,07	123.541.721,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional saldo 2019 dan 2018 adalah (189.397.520,07) dan (123.541.721,00)

Surplus/defisit sebelum pos luar biasa saldo 2019 dan 2018 adalah (26.543.113.355,53) dan (33.550.341.788,00)

Pos Luar Biasa

NO.	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018
1.	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
2.	Beban Luar Biasa	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00

Surplus/defisit dari pos luar biasa saldo 2019 dan 2018 adalah 0,00 dan 0,00

Surplus/defisit-Lo saldo 2019 dan 2018 adalah (26.543.113.355,53) dan (33.550.341.788,00)

6.4.4. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018. Laporan Perubahan Ekuitas pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut mulai disajikan Tahun Anggaran 2019.

Ekuitas akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 126.215.442.373,98 dibandingkan dengan ekuitas akhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 140.140.982.682,52

A. Ekuitas Awal

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 140.140.982.682,52 Nilai tersebut merupakan saldo akhir per 31 Desember 2018 yang berasal dari



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

gabungan Ekuitas Dana Lancar sebesar Ekuitas Dana Investasi

B. Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2019

Surplus / (Defisit)-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. (26.543.113.355,53) berasal dari pendapatan dikurangi beban Tahun Anggaran 2019. Mengenai hal tersebut, penjelasan lebih lengkap pada Catatan atas Laporan Operasional

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Laut

Ir. H. Muhammad Mursyi, M.Si
NIP. 19680304 199803 1 009

